

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

TAUFIQ NUR PRATAMA
B 200 050 145

**FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/kota telah memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam ketentuan umum UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Peran pemerintah pusat di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak pada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan tidak strategis, selebihnya sudah harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, demokratis,

mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan keadilan dan pemerataan serta mengembangkan keanekaragaman dan potensi daerah (Darise, 2007:14).

Halim (2001:167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi besar.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik. Mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, akan tetapi bagi daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya yang memadai, kebijakan tersebut akan memberatkan karena bagi daerah yang tidak mempunyai sumber dana yang melimpah akan kesulitan dalam membiayai belanja mereka (Adi, 2005). Sebelum era otonomi harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan

pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah (Mardiasmo, 2002). Selain itu kemampuan keuangan daerah otonom melaksanakan otonomi keuangan secara penuh dalam periode pendek diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas daerah otonom yang tidak dapat berubah begitu cepat maupun sistem keuangannya, yaitu pemerintah pusat tidak mau serta merta kehilangan kendali atas pemerintah daerah (Dwirandra, 2007).

Kemampuan pemerintah daerah otonom dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan. Yang dimaksud anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun, 2002:145). Anggaran daerah memegang peranan penting dalam era otonomi daerah, karena sebagai instrumen kebijakan perencanaan strategik daerah dalam pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2000).

Salah satu semangat reformasi keuangan daerah adalah dilakukannya pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah dan penilaian kinerja keuangan daerah otonomi agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah otonom mampu melaksanakan otonomi khususnya di bidang keuangan. Kinerja pemerintahan daerah akan ditentukan oleh ketepatan kebijakan dalam pemberian pelayanan publik yang ekonomis, efisien dan

efektif, oleh karena itu para eksekutif dan legislatif harus memahami sistem penentuan APBD berdasarkan kinerja (Triyono, 2002).

Dalam melihat kinerja pemerintah daerah otonom dalam mengelola keuangan daerah dapat digunakan alat pengukuran kinerja berupa analisis rasio keuangan APBD terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu apakah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas suatu organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Dari penelitian Suwarno (2006) tentang analisis kinerja pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah ditinjau dari aspek keuangan pada wilayah Kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta, kemandirian pemerintah daerah di setiap Kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta masih relatif rendah karena pemerintah daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta dilihat dari segi keuangan belum berhasil untuk mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta dan merupakan kabupaten tertinggal di Indonesia

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KEP.M-PDT) nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang strategi nasional pembangunan daerah tertinggal. Fakta ini tentunya mengisyaratkan bahwa Kabupaten Wonogiri belum mampu mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Meskipun demikian pemerintah Kabupaten Wonogiri selalu berupaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pertanggungjawaban keuangan Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri telah dilakukan setiap tahunnya dihadapan DPRD Kabupaten Wonogiri. Namun, pertanggungjawaban tersebut belum dilengkapi dengan informasi tentang bagaimanakah kinerja keuangan dan berbagai dimensi keuangan daerah otonom agar dapat diperoleh penilaian kinerja keuangan yang lebih komprehensif dalam melaksanakan otonomi keuangan daerah. Dalam kaitan ini sangatlah relevan dilakukan penelitian untuk mengetahui kinerja anggaran keuangan daerah otonom Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Wonogiri”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dikemukakan adalah:

1. Apakah anggaran keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri sudah berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien?
2. Bagaimana kinerja anggaran keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat sistem pengukuran kinerja ada dua alat ukur yaitu alat ukur finansial (keuangan) dan non finansial (non keuangan) maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan mengenai alat ukur kinerja finansial dengan menggunakan data APBD yang berbasis kinerja tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2008.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja anggaran keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri apakah sudah berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien.
2. Untuk menganalisis kinerja anggaran keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis untuk mengembangkan wawasan, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan sesuai dengan teori yang telah didapatkan dibangku kuliah.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dapat mengetahui posisi keuangan dan dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan otonomi daerahnya.
3. Dapat dijadikan landasan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini diantaranya terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metoda penelitian, analisis data dan pembahasan, dan penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang menguraikan secara teoritis tentang pengertian laporan keuangan, akuntabilitas dan akuntansi pemerintah, kinerja organisasi publik, otonomi daerah, tinjauan

keuangan daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengukuran kinerja anggaran keuangan daerah, analisis rasio keuangan APBD, serta tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang membahas mengenai jenis penelitian, obyek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis data dan pembahasan yang mengemukakan tentang gambaran umum Kabupaten Wonogiri, sejarah perkembangan pemerintahan Kabupaten Wonogiri, Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan hasil analisis data serta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Penutup yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran peneliti yang diharapkan berguna bagi Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait.